

Judul : Cegah Illegal Fishing : Dana Patroli Laut Mesti Diperbesar
Tanggal : Rabu, 06 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Cegah Illegal Fishing

Dana Patroli Laut Mesti Diperbesar

Komisi IV DPR menyoroti kegiatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bimbingan teknis (bimtek). Ditjen PSDKP ini mempunyai alokasi anggaran ketiga terbesar di KKP dengan persentase 16 persen lebih dari seluruh pagu anggaran di KKP.

"TAPI saya lihat uraian di PSDKP ini, banyak kegiatan terkait dengan bimtek," kata anggota Komisi IV DPR Slamet dalam rapat kerja bersama para pejabat eselon I KKP di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Rapat membahas Rencana Kerja Anggaran KKP Tahun 2024 dan usulan program-program yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Slamet merasa perlu mendapat penjelasan dari para pejabat KKP lantaran volume kegiatan bimtek ini terbilang banyak. Bimtek tersebut, antara lain untuk supervisi monitoring dan evaluasi (monev), bimtek penanganan perkara, dan lainnya. Sementara, alokasi anggaran untuk kegiatan

patroli pengawasan ruang laut masih minim.

"Bimteknya banyak sekali ini. Apakah pengamanan laut ini isinya hanya bimtek gitu? Apakah dengan bimtek, laut akan menjadi aman? Sementara ini kan ada PSDKP, ada Bakamla dan lainnya," terang Slamet.

Senada, anggota Komisi IV DPR Darori mengatakan, masalah pengawasan di daerah yang berbatasan laut dengan Indonesia ini perlu menjadi perhatian.

Saat ini ada sekitar 10 negara tetangga yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia, mulai dari India hingga Australia. Sementara, kemampuan KKP melakukan patroli terhadap

kegiatan penangkapan di daerah perbatasan ini sangat minim.

"Jadi pengawasan untuk perbatasan itu sangat kecil anggarannya, ya mungkin tidak sampai setahun (habis). Kemungkinan mungkin 4 bulan saja. Sisanya bagaimana," ungkap Darori.

Untuk itu, dia mendorong agar alokasi anggaran kegiatan patroli pengawasan ini perlu diperbesar. Sebab, perairan Indonesia rawan disusupi kapal-kapal nelayan asing.

"Nelayan-nelayan Filipina, Thailand, Vietnam dan seterusnya, itu sering masuk. Faktanya seperti itu," ujar anggota Fraksi Gerindra ini.

Dia tidak bisa menyalahkan lemahnya pengawasan dari KKP atas kegiatan *illegal fishing* ini. Sebab, memang anggarannya sangat terbatas. Makanya, diusulkan anggaran untuk pengawasan ruang laut ini diperbesar alokasinya. Jadi, pengawasan negara terhadap kapal-kapal asing bisa maksimal.

"Di laut kita itu nggak perlu

kasih makan ikan, nggak perlu tabur ikan, tapi ikan berkembang sendiri. Tapi kok orang lain yang ambil. Ini pemikiran ke depan," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga berpesan agar belanja dan kegiatan KKP lebih diprioritaskan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan nelayan. Apalagi saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan nelayan itu sangat tinggi, hingga mencapai 80 persen.

"Tolong ada kajian-kajian yang bisa meningkatkan pendapatan nelayan kita. Jadi, teman-teman Eselon I (KKP), mari sama-sama kita pikirkan menjadikan nelayan kita makmur," ajaknya.

Sekjen KKP Antam Novambar menjelaskan pagu indikatif KKP tahun 2024 sebesar Rp 7,04 triliun. Rencana pagu anggaran tersebut, terdiri dari belanja operasional Rp 2,99 triliun dan belanja non operasional sebesar Rp 4,05 triliun. Pihaknya juga mengusulkan alokasi tambahan

kepada Pemerintah untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 986,4 miliar.

Sementara, rencana alokasi DAK Fisik bidang kelautan dan perikanan tahun 2024 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan rincian provinsi sebesar Rp 489,1 miliar untuk kegiatan belanja pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan.

Lalu, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan, pengadaan sarana dan prasarana konservasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pergarakan.

Sementara, untuk DAK untuk kabupaten/kota sebesar Rp 820,78 miliar untuk kegiatan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil, pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan.

Juga untuk sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudi daya ikan skala kecil, dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. ■ KAL